

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:
PT.Citra Aditya.

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Cetakan ke-
2.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti.

Arief Budiman, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

A.W Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta : Rajawali.

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta:
Kencana.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga
Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua.

Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Jakarta : PT. RadjaGrafindo
Persada, Edisi 1.

Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat
Bahasa.

Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*,
Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

Prayudi Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto, 2017, *Dinamika
Politik Pilkada Serentak*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI.

Prihatmoko Joko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*,
Semarang: LP2I.

Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa
Pemilu Kini dan Kedepan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.

Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*,
Jakarta: Gunung Agung.

S.F Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai
Negeri Sipil Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia.

Sijarudin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang:
Setara Press.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PN
Rineka Cipta.

Suryosubroto, 2003, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka
Cipta.

S. Wojow Asito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: CV.
Pengarang.

Tommi A Legowo, 2006, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal*, Jakarta : Kerjasama ADEKSI dan Konrad-Adenauer-Stiftung.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang .

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08.A/MPAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020.

Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80A Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

C. Jurnal

Adrie, 2018, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Yustitia*, Vol.8, No.2, 2019. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/issue/view/4>.

- Ayu Shinta Larasati Musfira, 2021, "Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi Negara", *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11, No.1, 2021. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2512>.
- Azlan Thamrin, dkk,2022, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara*, Vol.1,No.1,2022.https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3238.
- Bayu Indra Permana, dkk, 2022, "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada", *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No.1,2022. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>.
- H.M. Soerya Respationo,2013, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42,No3,Juli2013.<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5827>.
- Mohammad Faisal Ridho, 2017, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 8e, 2017.<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8428/0>.
- Mohammad Saihu, 2019,"Pengembangan Pemilu Berintegrasi Hukum Kode Dan Etik", *Jurnal Etika dan Kode Etik Pemilu*, Vol.5, No.1, 2019. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.
- Muchlis Wajong dan Adi Putra, 2019, "Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Lex Administratum*, Vol.8, No.2, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum>.
- Primandha Sukma Nur Wardhani, 2018 "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No.1,2 018. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/840>

R Nazriyah, "Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.22, No.1, 2015.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4610>.

Triantafillou, 1985, "*The Politics of Administrative Ethics*", *Public Administration Review*, Vol.45, No.5, 1985.
<https://www.jstor.org/stable/3109930>.

Wayan Yoga Outra, Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani, 2022, "Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak", *Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa*, Vol.3, No.2, 2022.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4817>.

D. Internet

Andrew.W Finaka, *Sanksi Bagi ASN Tidak Netral*,
<https://indonesiabaik.id/infografis/sanksi-bagi-asn-tak-netral>,
diakses pada tanggal 16 September 2022 Pukul 22.02 WIB.

-----*ASN Netral, Ciptakan Demokrasi Berkualitas*,
<https://indonesiabaik.id/infografis/asn-netral-ciptakan-demokrasi-berkualitas>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, "Langkah Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN",
<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/artikel/langkah-pencegahan-pelanggaran-netralitas-asn> diakses tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23.28 WIB.

[Dodi Rosadi, Sanksi Bagi ASN Langgar Netralitas Di Pemilihan Kepala Daerah Serentak](https://abdinegaramuda.org/sanksi-bagi-asn-langgar-netralitas-di-pemilihan-kepala-daerah-serentak-2020/), <https://abdinegaramuda.org/sanksi-bagi-asn-langgar-netralitas-di-pemilihan-kepala-daerah-serentak-2020/>, diakses pada tanggal 16 September 2022 Pukul 22.02 WIB.

[Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jelang Pilkada Serentak 2020, ASN Diimbau Jaga](#)

- Netralitas*, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jelang-Pilkada-serentak-2020-asn-diimbau-jaga-netralitas>, diakses pada tanggal 14 September 2022 Pukul 23.35 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Dalam Jaringan)* <https://kbbi.web.id/netral>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 12.26 WIB.
- Perludem, Pemilihan Kepala Daerah Adalah Pemilu*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFg8-cyYj9AhWUzjgGHWVJCp0QFnoECD4QAQ&url=http%3A%2F%2Fperludem.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FPolicy-Brief-03-Pemilihan-Kepala-Daerah-Langsung-adalah-Pemilu.pdf&usg=AOvVaw0u09_009K4WIp4vpYKFUVv, diakses pada tanggal 09 Februari 2023 Pukul 22.02 WIB.
- Puput Purwanti, 4 Pengertian Pilkada Serentak Bagi Demokrasi Indonesia*, <https://hukamnas.com/pengertian-Pilkada-serentak>, diakses pada tanggal 18 September 2022 Pukul 20.55 WIB.
- Ratna Puspita, Rekomendasi Sanksi ASN Tak Netral Meningkatkan Signifikan*, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qlprsk428/rekomendasi-sanksi-asn-tak-netral-meningkat-signifikan>, diakses pada tanggal 8 September 2022 Pukul 14.00 WIB.
- Robbie, Bawaslu Pasbar Ungkap Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 Terhadap ASN*, <http://matasumbar.com/Bawaslu-pasbar-ungkap-dugaan-pelanggaran-Pilkada-2020-terhadap-asn/>, diakses pada tanggal 8 september 2022 Pukul 15.53 WIB.
- Satria, Menilik Isu Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak 2020*, <https://ugm.ac.id/id/berita/20377-menilik-isu-netralitas-asn-dalam-Pilkada-serentak-2020> , dikunjungi pada tanggal 17 September 2022 Pukul 22.12 WIB.
- Serafica Gischa, Pemilu: Pengertian Alasan, Fungsi, Asas, dan Tujuan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemil>

[u-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all](#) , diakses pada tanggal 17 September 2022 Pukul 23.12 WIB.

Wiliam Endha, *Netralitas PNS Dalam Pilkada*, https://www.academia.edu/37324721/NETRALITAS_PNS_DALAM_PILKADA, diakses pada tanggal 16 September 2022 Pukul 23.18 WIB.

